



**BERITA ACARA**  
**REKOMENDASI RAPAT KERJA TEKNIS KE-8**  
**KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA 2018**

**BIDANG KELEMBAGAAN**

Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 bertempat di The Mirah Hotel, Bogor telah diadakan Rapat Bidang Kelembagaan pada Rapat Kerja Teknis Ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2018.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh Peserta Rapat Bidang Kelembagaan Rapat Kerja Teknis Ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2018 yang nama-namanya tercantum dibawah ini:

Ketua : Setni Betlina (Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah)

Sekretaris : Sondri (Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat)

Anggota :

No.	Nama	Komisi Informasi
1	Mohamad Isya	Provinsi Kalimantan Utara
2	Andi Hatta	Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Zufra	Provinsi Riau
4	Tatang Suwardi	Kabupaten Cirebon
5	Warsono	Provinsi DIY
6	Medianty T.S.	Provinsi Kepri
7	Isman	Kabupaten Toli-toli
8	Meysalina	Provinsi Sumatera Utara
9	Abdul Jalil	Provinsi Sumatera Utara
10	Alamsyah Basri	Provinsi DKI Jakarta
11	I Made Wijaya	Provinsi Bali
12	Marhenita	Provinsi Sumatera Utara
13	Nurlaily Idrus	Aceh
14	Ketty Tri Set	Provinsi Jawa Timur
15	Nurhendra	Kota Cirebon
16	Cecep Suryadi	Pusat
17	Syamsu Rizal	Provinsi Sumatera Barat
18	Ferawati	Provinsi Kalimantan Tengah
19	HM Riduansyah	Provinsi Kalimantan Selatan

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

20	Rahmat Idrus	Provinsi Sulawesi Barat
21	Budi Yoga Permana	Provinsi Jawa Barat
22	Budi Jaya Idris	Provinsi Lampung
23	Syarif Muhammad Herry	Provinsi Kalimantan Barat
24	Hendra Purnama	Pusat
25	Sosiawan	Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil Rapat Bidang Kelembagaan Rapat Kerja Teknis Ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2018 telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan masukan secara tertulis terkait draft Perki Kelembagaan Komisi Informasi kepada Komisi Informasi Pusat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah Rakernis 2018 ini selesai.
2. Membentuk Tim Perumus draft Perki Kelembagaan Komisi Informasi oleh Komisi Informasi Pusat dengan melibatkan sejumlah 16 Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir).
3. Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan BNSP dan lembaga terkait sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait sertifikasi PPID.
4. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik pada:
  - a. Partai Politik; dan
  - b. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Perlunya penyusunan rancangan revisi PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2018).\*

Demikian Berita Acara Rekomendasi Rapat Kerja Teknis Ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2018 Bidang Kelembagaan disusun dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

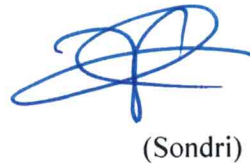
Bogor, 29 Juni 2018

KETUA



(Setni Betlina)

SEKRETARIS



(Sondri)

\* Tambahan rekomendasi pada Pleno II Finalisasi Rapat Kerja Teknis ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia 2018.

Lampiran Berita Acara Rekomendasi Rapat Kerja Teknis ke-8  
Komisi Informasi se-Indonesia 2018  
Bidang Kelembagaan

**Tim Perumus Draft Perki Kelembagaan KI**

No.	Komisi Informasi
1	Sumatera Barat
2	Lampung
3	Sumatera Utara
4	DKI
5	Jawa Timur
6	Jawa Tengah
7	Kota Cirebon
8	Jawa Barat
9	Kab Cirebon
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Bali
13	Sulawesi Barat
14	Sulawesi Selatan
15	Papua
16	Nusa Tenggara Barat